

Dinamika Akses Orang Rimba Terhadap Hutan di Tengah Ekspansi Kelapa Sawit

Serly Senora¹, Adri Febrianto^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: febrianto@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi akses Orang Rimba terhadap hutan, menganalisis hambatan sosial dan struktural yang mereka hadapi serta menjelaskan strategi yang digunakan untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya alam di tengah ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit. Penelitian kualitatif dengan studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dengan *A Theory of Access*, yang menekankan bahwa akses terhadap sumber daya tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan formal, tetapi juga oleh relasi sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum ekspansi, Orang Rimba memiliki akses bebas terhadap hutan untuk berburu dan meramu. Setelah masuknya perkebunan sawit, akses mereka menjadi terbatas oleh aturan perusahaan. Untuk bertahan, mereka memanfaatkan strategi adaptif seperti membangun relasi sosial dengan pihak perusahaan, memanfaatkan pengetahuan lokal, serta mengambil brondolan sawit sebagai sumber ekonomi alternatif. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya mempertahankan akses dilakukan melalui mekanisme informal dan resistensi halus terhadap sistem kekuasaan formal. Oleh karena itu artikel ini menggambarkan ekspansi Perkebunan kelapa sawit PT. Tidar Kerinci Agung (PT. TKA) telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat adat Orang Rimba yang selama ini menggantungkan hidup pada hutan.

Kata Kunci: Dinamika; Ekspansi; Orang Rimba; Teori akses; Strategi adaptasi.

Abstract

This study aims to describe the condition of the Orang Rimba's access to the forest, analyze the social and structural barriers they face, and explain the strategies they use to maintain access to natural resources amid the expansion of oil palm plantations. The research employs a qualitative case study approach through observation, in-depth interviews, and documentation. The analysis is conducted using the Theory of Access, which emphasizes that access to resources is not only determined by formal ownership but also by social, economic, and power relations. The results show that before the expansion, the Orang Rimba had free access to the forest for hunting and gathering. After the arrival of the oil palm plantations, their access became restricted by company regulations. To persevere, they employed adaptive strategies such as building social relationships with company representatives, utilizing local knowledge, and collecting loose palm fruit as an alternative source of income. These findings indicate that efforts to maintain access are carried out through informal mechanisms and subtle forms of resistance against the formal power system. Therefore, this article illustrates that the expansion of the PT. Tidar Kerinci Agung (PT. TKA) oil palm plantation has brought significant changes to the lives of the Orang Rimba indigenous community, who have traditionally relied on the forest for their livelihood.

Keywords: Adaptation strategies; Access theory; Dynamics; Expansion; Orang Rimba.

How to Cite: Senora, S. & Febrianto, A. (2026). Dinamika Akses Orang Rimba Terhadap Hutan di Tengah Ekspansi Kelapa Sawit. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 8(1), 25-35.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. © 2026 by author.

Pendahuluan

Ekspansi industri kelapa sawit di Indonesia telah menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi nasional, juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, budaya, dan ekologis. Sampai 2024 luas lahan kelapa sawit tercatat mencapai lebih dari 379 ribu hektar. Salah satu wilayah yang terdampak langsung adalah kawasan konsesi PT. Tidar Kerinci Agung (PT. TKA), yang merupakan ruang hidup komunitas adat Orang Rimba, yaitu masyarakat pedalaman yang secara turun-temurun bergantung pada hutan untuk berburu, meramu, serta berpindah tempat (nomaden), di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi.

Secara historis, kawasan yang saat ini menjadi wilayah konsesi PT. TKA awalnya merupakan bagian dari bentang hutan tropis dataran rendah yang menjadi jalur jelajah satwa liar dan ruang hidup berbagai kelompok masyarakat adat, termasuk Orang Rimba. Pada awal 1980-an hingga 1990-an, pemerintah membuka kawasan tersebut melalui program pembangunan perkebunan besar, transmigrasi, dan investasi swasta. Sejak memperoleh izin dan Hak Guna Usaha (HGU), PT. TKA mulai melakukan pembukaan hutan dan mengubahnya menjadi perkebunan kelapa sawit secara bertahap. Oleh Orang Rimba, keberadaan perusahaan menjadi titik perubahan penting dari kehidupan berbasis hutan yang bebas menuju negosiasi dengan batas akses dan struktur kekuasaan eksternal.

Orang Rimba merupakan kelompok masyarakat adat yang tersebar di wilayah Sumatera, terutama di Jambi dan sebagian Sumatera Barat. Populasi mereka diperkirakan mencapai beberapa ribu jiwa dan terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil kekerabatan yang dikenal sebagai komunitas Orang Rimba. Identitas budaya yang kuat, pengetahuan lokal, serta hubungan spiritual dengan lingkungan menjadikan hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari sistem nilai, sosial, dan sistem kepercayaan mereka.

Masuknya perkebunan sawit telah menggeser sistem penguasaan ruang dari hak adat menjadi HGU perusahaan. Kondisi ini berdampak pada hilangnya ruang hidup Orang Rimba dan pembatasan akses terhadap sumber daya alam yang sebelumnya dapat diakses secara bebas. Dalam konteks ini, *A Theory of Access* (Ribot & Peluso, 2003) relevan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan, relasi sosial, dan struktur ekonomi-politik memengaruhi kemampuan masyarakat adat dalam mempertahankan akses terhadap sumber daya. Penelitian ini bertujuan: (1) menggambarkan kondisi akses Orang Rimba terhadap hutan; (2) menganalisis hambatan sosial dan struktural yang mereka hadapi; serta (3) menjelaskan strategi yang digunakan untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya alam di tengah ekspansi perkebunan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit telah membawa perubahan mendalam terhadap kehidupan masyarakat adat dan pedesaan di Sumatera dan wilayah lain di Indonesia. Prasetijo (2017) menegaskan bahwa Orang Rimba mengubah strategi mata pencaharian mereka sebagai bentuk perlawanan diam terhadap deforestasi, sementara dalam penelitian lainnya Prasetijo (2018) menjelaskan bagaimana komunitas ini terpaksa mengembangkan strategi adaptasi baru ketika hutan—ruang hidup utama mereka—dikonversi menjadi perkebunan sawit. Dampak ekspansi sawit juga tampak pada penelitian Azzahra et al. (2015), yang menunjukkan bagaimana perempuan memegang peran penting dalam menjaga ketahanan nafkah rumah tangga di Jambi. Temuan mengenai adaptasi sosial, ekonomi, dan ekologi turut diperkuat oleh Putri et al. (2016) melalui studi pada petani kecil di Kalimantan Tengah, serta Wati et al. (2017) yang menggambarkan transformasi struktur nafkah dari pertanian karet menuju komoditas sawit di Minangkabau. Di tingkat ekologis, Fatmasari et al. (2018) menunjukkan bahwa perubahan lanskap akibat ekspansi sawit telah menciptakan dilema nafkah bagi masyarakat pedesaan di Sulawesi Barat. Dampak perubahan penggunaan lahan terhadap ketahanan pangan juga terlihat dalam penelitian Sudrajat et al. (2021), yang menemukan bahwa konversi lahan sawit di Kalimantan Barat menyebabkan meningkatnya kerentanan pangan masyarakat desa. Kerentanan serupa juga disoroti oleh Obie (2019) melalui studi kasus di Pohuwato yang menunjukkan semakin rentannya nafkah masyarakat pedesaan di bawah sistem inti-plasma. Di Sumatera Selatan, Al Adawiyah et al. (2021) menjelaskan bagaimana petani sawit skala kecil berupaya mempertahankan ketahanan ekonomi mereka di tengah fluktuasi produksi dan pasar. Secara lebih luas, laporan Human Rights Watch (2019) memperlihatkan bahwa ekspansi sawit tidak hanya mengubah struktur ekonomi masyarakat adat, tetapi juga memicu berbagai pelanggaran hak atas tanah dan hilangnya ruang hidup, sebagaimana dialami oleh komunitas seperti Orang Rimba. Temuan dari berbagai penelitian ini memperlihatkan gambaran yang konsisten bahwa ekspansi sawit tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada relasi kuasa, sumber penghidupan, dan keberlanjutan masyarakat adat serta pedesaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi akses Orang Rimba terhadap hutan, menganalisis hambatan sosial dan struktural yang mereka hadapi serta menjelaskan strategi yang digunakan untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya alam di tengah ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit. Penelitian ini dianalisis dengan *A Theory of Access* (Ribot & Peluso, 2003) yang menekankan bahwa akses terhadap sumber daya tidak

hanya ditentukan oleh kepemilikan formal, tetapi juga oleh relasi sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Temuan ini diharapkan menjadi *novelty* atau kebaruan dari penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tipe studi kasus. Lokasi penelitian berada di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Tidar Kerinci Agung yang terletak di perbatasan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Bungo (Jambi). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan penggunaan data dokumentasi yang ada. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial dan aktivitas ekonomi Orang Rimba. Observasi dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu dimana keberadaan Orang Rimba yang berada di kawasan Perkebunan kelapa sawit dan memastikan apa benar itu Orang Rimba atas komunitas adat yang lain karena di PT. TKA tidak hanya komunitas Orang Rimba yang hidup bergantung pada alam dan hidup nomaden tetapi juga ada komunitas adat lainnya seperti Orang Nias. Setelah mengamati dan memastikan bahwa komunitas tersebut memang benar komunitas Orang Rimba peneliti melakukan pengamatan dengan melakukan pendekatan informal dengan mendatangi komunitas Orang Rimba (kelompok tinggal) yang berada di pinggir kebun. Pada fase ini peneliti tidak langsung mencatat atau bertanya, tetapi lebih banyak mengamati perilaku sehari-hari dan bertanya bagaimana struktur kepemimpinan komunitas Orang Rimba (siapa pemimpin, siapa pengambil keputusan). Peneliti juga fokus pada observasi relasi sosial yang muncul akibat perubahan struktur ruang, misalnya interaksi antara Orang Rimba dengan petugas keamanan (*security*) dan pegawai PT. TKA, hubungan mereka dengan masyarakat lokal serta bagaimana respons masyarakat terhadap pembatasan akses seperti portal, tanda larangan, dan patroli Perusahaan melalui observasi ini, terlihat bagaimana kuasa formal perusahaan memengaruhi akses dan bagaimana Orang Rimba merespons melalui strategi adaptasi maupun negosiasi informal.

Wawancara mendalam, dengan tokoh adat dan pemangku adat Orang Rimba, sebagai sumber utama informasi mengenai struktur sosial, aturan adat, dan perubahan akses ruang. Anggota komunitas Orang Rimba (laki-laki dan perempuan) dari berbagai kelompok usia untuk menggali pengalaman hidup, strategi bertahan, dan persepsi mereka terhadap perubahan tata ruang. Perwakilan perusahaan (PT. TKA), seperti bagian hubungan masyarakat (Humas) dan manajemen lapangan, untuk memperoleh perspektif terkait kebijakan akses, pemanfaatan lahan, dan hubungan perusahaan dengan komunitas adat. Pemangku kepentingan eksternal, seperti aparat nagari/desa, pemerintah daerah, dan pendamping LSM terkait isu hak masyarakat adat, guna memperkaya data kontekstual dan validasi. Pemanfaatan dokumen, berupa arsip perusahaan, peta konsesi, dokumen kebijakan, dan foto aktivitas Orang Rimba lapangan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1992), yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan selama proses penelitian berlangsung. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode, sehingga informasi dari berbagai pihak dapat saling diperiksa dan dibandingkan untuk memperoleh gambaran yang valid dan kredibel.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Sosial dan Adaptasi Pola Hidup

Ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh PT. Tidar Kerinci Agung (PT. TKA) sejak 1984 telah membawa perubahan besar terhadap ruang hidup Orang Rimba. Sebagai proyek PMDN yang memperoleh fasilitas Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN), PT. TKA membuka lahan mulai 15 Januari 1986 dan melakukan tanam perdana pada Desember tahun yang sama. Luas tanam meningkat hingga 17.407 hektar dan total konsesi perusahaan kini mencapai 28.029 hektar, termasuk 5.099 hektar kawasan lindung. Perubahan lanskap hutan menjadi perkebunan sawit menggambarkan proses transformasi ekologis dan ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh Fatmasari et al. (2018) bahwa ekspansi sawit mengubah struktur ruang dan sistem penghidupan masyarakat adat secara fundamental (Lubis et al., 2011; Fatmasari et al., 2018).

Perubahan tersebut membawa dampak nyata terhadap kehidupan semi-nomaden Orang Rimba di dalam wilayah konsesi. Tumenggung Jangaman (58 tahun) dalam wawancara 15 Februari 2025 menjelaskan bahwa sebelum ekspansi, komunitasnya dapat keluar masuk hutan untuk berburu babi dan mencari rotan tanpa hambatan. Namun setelah PT. TKA memperoleh HGU, mereka dapat diusir jika dianggap melanggar batas kebun atau dicurigai mencuri, sehingga ruang jelajah kini terbatas pada sekitar aliran sungai. Kondisi ini sesuai dengan temuan Prasetijo (2017) bahwa ekspansi sawit secara struktural membatasi mobilitas kelompok adat yang hidup berpindah (Jangaman, wawancara 15 Februari 2025).

Dalam kerangka A Theory of Access dari [Ribot & Peluso \(2003\)](#), hilangnya kebebasan ruang tersebut mencerminkan pergeseran relasi kuasa dari akses berbasis hak adat menuju kontrol melalui otoritas hukum perusahaan. PT. TKA menggunakan legitimasi HGU sebagai bentuk authority, sementara Orang Rimba hanya memperoleh akses bersyarat dan informal. Pergeseran dari actual access menuju kontrol korporasi ini memperlihatkan bahwa akses ditentukan bukan oleh kepemilikan, tetapi oleh kekuasaan yang mampu menegakkan batas-batas ruang ([Ribot & Peluso, 2003](#); [Vandergeest & Peluso, 2006](#)).

Selain pembatasan ruang hidup, Orang Rimba juga mengalami hambatan sosial berupa stigma. Mereka masih sering disebut “orang kubu” atau dinilai “terbelakang”. Tumenggung Jangaman menyebut stigma tersebut memengaruhi cara masyarakat luar memperlakukan mereka. Dalam analisis teori akses, stigma berperan sebagai mekanisme kultural yang membatasi modal sosial dan menghambat akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan pekerjaan formal. Temuan ini sejalan dengan [Harmaini et al. \(2022\)](#) yang menjelaskan bahwa stereotip negatif menjadi faktor penting dalam marginalisasi masyarakat adat di sekitar wilayah sawit ([Harmaini et al., 2022](#); [Ribot & Peluso, 2003](#)).



Gambar 1. Kondisi Orang Rimba di PT. TKA
Sumber foto: Dok. Serly, lokasi afdeling 1, 2 Agustus 2025

Perubahan struktur ruang juga mendorong Orang Rimba mengadopsi teknologi modern dalam praktik subsistensi mereka. Bapak Roni (36 tahun) menyebut bahwa peralihan dari tombak ke senapan angin membuat kegiatan berburu lebih efektif dan meningkatkan peluang memperoleh “reski” seperti babi hutan. Transformasi teknologi ini menggambarkan proses adaptasi sebagaimana dijelaskan oleh [Prasetijo \(2017\)](#), bahwa kelompok adat merespons perubahan ekologis dengan memodifikasi teknik subsistensi mereka (Roni, wawancara 2 Agustus 2025).

Selain perubahan pada teknologi berburu, penggunaan sepeda motor juga membawa dampak besar terhadap pola mobilitas Orang Rimba dalam kehidupan sehari-hari. Jika sebelumnya mereka harus berjalan kaki menempuh jarak jauh untuk mencapai pasar, mencari kebutuhan pokok, atau berpindah lokasi tempat tinggal, kini perjalanan tersebut menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Mantap (18 tahun) menjelaskan bahwa sepeda motor memudahkan mereka mengangkut hasil buruan, membawa barang-barang ketika berpindah tempat, atau sekadar pergi ke pasar desa terdekat untuk membeli kebutuhan yang tidak lagi dapat diperoleh dari hutan. Bagi komunitas yang sebelumnya mengandalkan mobilitas jalan kaki mengikuti pola hidup semi-nomaden, kehadiran sepeda motor menjadi perubahan yang sangat signifikan.

Adaptasi teknologi ini juga menggambarkan bagaimana Orang Rimba semakin terhubung dengan sistem transportasi modern. Sepeda motor tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilitas, tetapi juga sebagai sarana penting untuk memperluas jaringan ekonomi. Dengan kendaraan, mereka dapat menjual hasil buruan lebih cepat, mencapai pasar yang lebih jauh, atau berinteraksi lebih mudah dengan warga desa dan pedagang. Selain itu, penggunaan sepeda motor mengurangi ketergantungan mereka pada jalur hutan tradisional dan membuat mereka semakin sering menggunakan jalan perusahaan atau akses publik yang terhubung dengan infrastruktur desa.

Perubahan ini sejalan dengan temuan [Rahmania & Faristiana \(2023\)](#), yang menyatakan bahwa teknologi transportasi mampu mempercepat pergeseran gaya hidup masyarakat adat, terutama ketika akses terhadap sumber daya tradisional semakin terbatas. Bagi Orang Rimba, sepeda motor bukan hanya simbol kemajuan, tetapi juga bagian dari strategi bertahan hidup dalam situasi di mana mereka harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, ekonomi, dan sosial di sekitar mereka. Dengan demikian, penggunaan teknologi transportasi modern menunjukkan bahwa dinamika mobilitas Orang Rimba kini tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pola migrasi adat, tetapi juga oleh kebutuhan untuk terhubung dengan sistem ekonomi dan infrastruktur yang telah berkembang di wilayah konsesi sawit.

Integrasi teknologi tersebut juga mencerminkan pergeseran ekonomi dari sistem subsisten menuju ekonomi pasar. Jika sebelumnya kebutuhan dipenuhi melalui hasil buruan dan ramuan hutan, kini hasil tersebut ditukar dengan uang untuk membeli beras, gula, dan kebutuhan pokok lain. Proses ini menciptakan ketergantungan baru terhadap pasar dan memperlihatkan pola adaptasi ekonomi yang mirip dengan temuan Putri et al. (2018) mengenai perubahan nafkah masyarakat di wilayah ekspansi sawit (Putri et al., 2018; Rahmania & Faristiana, 2023). Secara keseluruhan, dinamika yang terjadi menunjukkan bagaimana ekspansi perkebunan sawit mengonstruksi ulang struktur ekonomi, sosial, dan ekologis kehidupan Orang Rimba. Mereka kini berada dalam sistem relasi kuasa baru yang dibentuk oleh perusahaan pemegang HGU, sambil berupaya mempertahankan ruang hidup melalui adaptasi teknologi, strategi ekonomi informal, dan pemaknaan ulang identitas adat. Sejalan dengan Peluso (2023), kondisi ini menunjukkan bahwa konflik akses tidak hanya soal kepemilikan lahan, tetapi menyangkut resistensi simbolik dan strategi bertahan dalam struktur kekuasaan modern (Peluso, 2023; Ribot & Peluso, 2003).

Kondisi Ekonomi dan Strategi Adaptasi

Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan transformasi mendasar dalam struktur ekonomi Orang Rimba. Sebelum ekspansi perkebunan, hutan berfungsi sebagai ruang ekologis sekaligus ekonomi yang menyediakan beragam hasil hutan non-kayu seperti madu, damar, rotan, dan umbut. Hutan adalah ruang terbuka tanpa batasan administratif, sehingga pemanfaatannya berlangsung secara bebas dan berkelanjutan menurut mekanisme pengetahuan lokal. Namun setelah hutan dikonversi menjadi kebun sawit, ketersediaan sumber daya tersebut mengalami penurunan drastis. Penjelasan Panglima (67 tahun) yang menyatakan semakin sulitnya menemukan hasil hutan menunjukkan bahwa perubahan ekologis tidak hanya merusak lanskap fisik, tetapi juga menghapus basis produksi dan mata pencaharian yang telah menopang kehidupan Orang Rimba secara turun-temurun. Fenomena ini mengonfirmasi argumentasi Fatmasari et al. (2018) mengenai hubungan erat antara ekspansi sawit dan hilangnya sumber nafkah masyarakat adat di wilayah konsesi.

Dalam konteks perubahan tersebut, Orang Rimba menampilkan respons adaptif melalui rekonfigurasi praktik ekonomi. Berburu babi hutan, yang sebelumnya dilakukan semata untuk konsumsi, mengalami transformasi menjadi aktivitas komersial. Hasil buruan kini dijual, dan nilai ekonominya jauh melampaui nilai konsumsi subsisten. Perubahan alat berburu dari tombak ke senapan angin memperlihatkan integrasi teknologi modern ke dalam sistem penghidupan tradisional. Seperti dijelaskan Dedek (45 tahun), penggunaan senapan angin memungkinkan peningkatan volume buruan yang kemudian diangkut menggunakan sepeda motor untuk dijual ke pengepul. Perubahan ini menunjukkan bahwa Orang Rimba tidak pasif dalam menghadapi tekanan struktural, tetapi melakukan adaptasi yang bersifat market-oriented. Pola ini sesuai dengan kerangka Sustainable Livelihood Framework, di mana rumah tangga memobilisasi berbagai modal baik natural, teknologi, maupun sosial untuk mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah perubahan eksternal.

Namun, tidak semua sumber nafkah dapat beradaptasi. Pengumpulan hasil hutan seperti madu dan damar menjadi semakin sulit karena hilangnya pepohonan besar. Panglima (67 tahun) kembali menegaskan bahwa sumber madu yang dulu melimpah kini hampir tidak ditemukan. Situasi ini mencerminkan bentuk pembatasan akses ekologis sebagaimana dijelaskan Ribot & Peluso (2003), yaitu ketika sumber daya tidak dapat lagi dimanfaatkan bukan karena aturan formal, tetapi karena habitat ekologisnya telah hancur. Dengan demikian, masalah akses tidak hanya bersifat politik atau legal, tetapi juga biogeografis.

Strategi adaptasi lainnya yang dilakukan Orang Rimba adalah memanfaatkan *brondolan* sawit yang jatuh ke tanah sebagai sumber penghidupan harian. Dalam perspektif perusahaan, tindakan ini dikategorikan sebagai pencurian karena *brondolan* tetap dianggap bagian dari aset produksi perkebunan. Namun, bagi Orang Rimba, *brondolan* sawit memiliki makna yang berbeda. Mereka melihat *brondolan* sebagai hasil alam yang tidak lagi berada di pohon, sehingga dapat dikumpulkan tanpa merusak tanaman. Lebih dari itu, praktik ini dipahami sebagai cara yang sah secara moral untuk memenuhi kebutuhan hidup karena wilayah tempat *brondolan* itu berada dahulu merupakan ruang hidup leluhur mereka. Oleh sebab itu, tindakan mengumpulkan *brondolan* tidak dianggap melanggar, melainkan sebagai bentuk pemanfaatan sisa-sisa hasil hutan yang telah hilang akibat ekspansi perkebunan. Kesaksian Ibu Radiah (37 tahun) menggambarkan bahwa pengambilan *brondolan* sawit dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pendapatan dari *brondolan* dapat digunakan untuk membeli beras, gula, minyak, atau kebutuhan pokok lainnya—sesuatu yang sebelumnya dapat dipenuhi dari hasil hutan seperti madu, umbut, atau rotan. Situasi ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan strategi bertahan hidup yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam kondisi sumber daya alam yang semakin sulit ditemukan, *brondolan* sawit menjadi salah satu sumber ekonomi paling mudah dijangkau oleh perempuan, anak-anak, dan anggota komunitas yang tidak ikut berburu. Dalam kerangka teori *everyday resistance* yang dijelaskan oleh Scott

(1985), tindakan pengambilan *brondolan* ini dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan sehari-hari yang tidak terorganisir tetapi berlangsung terus-menerus. Perlawanan ini tidak menantang kekuasaan perusahaan secara langsung atau konfrontatif, namun dilakukan secara halus melalui tindakan-tindakan kecil yang mempertahankan ruang gerak dan strategi ekonomi masyarakat adat. Perlawanan semacam ini muncul ketika masyarakat memiliki posisi yang lemah dalam struktur kekuasaan, sehingga mereka memilih cara-cara yang aman, tidak menimbulkan konflik terbuka, tetapi tetap memungkinkan mereka memperoleh kembali sebagian manfaat dari ruang hidup yang telah direbut oleh kekuatan eksternal.

Pengambilan *brondolan* sawit oleh Orang Rimba tidak sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan proses negosiasi diam-diam terhadap struktur kekuasaan yang menekan. Praktik ini menjadi bukti bahwa meskipun akses mereka secara formal dibatasi, Orang Rimba tetap mencari cara untuk menegosiasikan ulang hubungan mereka dengan tanah dan sumber daya yang telah secara historis menjadi bagian dari kehidupan mereka. Aktivitas ini menunjukkan bagaimana strategi bertahan hidup, klaim moral atas ruang, serta bentuk perlawanan kecil saling berkelindan dalam kehidupan sehari-hari komunitas adat di tengah dominasi perkebunan skala besar.

Upaya untuk masuk ke sektor kerja formal perusahaan tidak memberikan hasil yang signifikan. Hambatan administratif seperti ketiadaan ijazah dan dokumen kependudukan menjadi faktor struktural yang membatasi akses kerja. Di sisi lain, stigma sosial yang mengkonstruksi Orang Rimba sebagai kelompok “tidak disiplin” dan “sulit diatur” memperkuat eksklusi mereka dari pasar tenaga kerja formal. Pengalaman Lukas (24 tahun) menunjukkan bahwa diskriminasi sosial dan persyaratan administratif bekerja bersama sebagai mekanisme yang secara sistematis menutup peluang ekonomi formal bagi kelompok adat. Temuan ini konsisten dengan kajian [Harmaini et al. \(2022\)](#) mengenai marginalisasi masyarakat adat di wilayah produksi perkebunan.

Secara keseluruhan, dinamika ekonomi Orang Rimba pada masa ekspansi perkebunan sawit memperlihatkan adanya pergeseran fundamental dari sistem penghidupan berbasis hutan menuju sistem ekonomi informal yang sangat bergantung pada pasar dan relasi kuasa dengan perusahaan. Meski menghadapi berbagai bentuk pembatasan, Orang Rimba tidak bersifat pasif. Mereka justru mengembangkan berbagai strategi adaptif—mulai dari intensifikasi berburu, komersialisasi hasil hutan liar, penggunaan teknologi modern, hingga praktik resistensi sehari-hari—untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Pola ini menunjukkan bahwa strategi penghidupan komunitas adat tidak pernah monolitik, melainkan merupakan proses negosiasi yang kompleks antara kebutuhan lokal, kerentanan ekologis, dan struktur kekuasaan korporasi.

Akses Orang Rimba terhadap Hutan

Akses Orang Rimba terhadap hutan mengalami perubahan mendasar dari sistem adat yang bersifat tidak tertulis menjadi sistem yang dikendalikan oleh aturan legal dan mekanisme kontrol korporasi. Pada masa sebelum ekspansi perkebunan, Orang Rimba mengelola hutan berdasarkan aturan adat, relasi genealogis, dan praktik turun-temurun yang memberi mereka kebebasan untuk berpindah, berburu, dan memanfaatkan hasil hutan tanpa batasan administratif. Namun setelah wilayah tersebut berubah menjadi areal Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Tidar Kerinci Agung, ruang gerak mereka menjadi terbatas dan seluruh aktivitas berada di bawah pengawasan perusahaan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Panglima (67 tahun), yang menyatakan bahwa ruang hidup yang dulu bebas kini dianggap sebagai wilayah perusahaan, dan setiap aktivitas harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Pergeseran ini menunjukkan perubahan otoritas dari pemimpin adat kepada institusi formal negara dan korporasi sebagai pemegang kendali sah atas lahan ([Ribot & Peluso, 2003](#)).

Dalam perspektif *A Theory of Access* ([Ribot & Peluso, 2003](#)), perubahan tersebut memperlihatkan bahwa akses tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan formal, tetapi oleh mekanisme kekuasaan yang menentukan siapa yang dapat menggunakan sumber daya. Ketika hutan masuk ke dalam konsesi perusahaan, hak adat tidak lagi memiliki legitimasi hukum. Akibatnya, kemampuan Orang Rimba untuk mengakses hutan sangat bergantung pada izin informal, negosiasi dengan petugas lapangan, atau toleransi pihak perusahaan. Situasi ini menciptakan bentuk akses yang tidak stabil, di mana penggunaan hutan dapat sewaktu-waktu dibatasi atau dilarang tergantung kebijakan perusahaan. Dengan demikian, akses yang sebelumnya bersifat otonom kini berubah menjadi “akses bersyarat” yang ditentukan oleh aktor yang memiliki otoritas legal ([Ribot & Peluso, 2003](#); [Pandjaitan et al., 2016](#)).

Delapan kategori akses yang dijelaskan Ribot & Peluso (2003) meliputi *rights, authority, capital, knowledge, technology, market, social identity, dan social relations* dapat membantu memahami bagaimana perubahan struktur kekuasaan ini memengaruhi kehidupan Orang Rimba. Pada aspek *rights* dan *authority*, hak adat mereka terdorong oleh dominasi HGU perusahaan. Pada aspek teknologi dan market, mereka harus beradaptasi dengan menggunakan senapan angin dan transportasi bermotor untuk memperoleh pendapatan melalui penjualan buruan. Dalam aspek *social identity*, stigma sebagai “orang kubu”

menjadikan mereka kelompok yang dimarginalisasi, sehingga peluang kerja formal dan layanan publik sulit dijangkau. Sedangkan pada aspek social relations, hubungan dengan pekerja kebun, pengepul, dan masyarakat sekitar menjadi sarana alternatif bagi mereka untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya. Namun semua mekanisme ini bersifat rapuh karena bergantung pada kebijakan perusahaan dan relasi sosial yang dapat berubah setiap saat (Fatmasari et al., 2018; Peluso, 2023; Harmaini et al., 2022).

Transformasi akses ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Orang Rimba bukan hanya berkaitan dengan hilangnya hutan secara fisik, tetapi juga perubahan mendalam dalam relasi sosial, ekonomi, politik, dan ekologis yang memengaruhi kemampuan mereka bertahan hidup. Ketika akses ditentukan oleh struktur kekuasaan yang lebih besar, Orang Rimba berada pada posisi paling rentan karena tidak memiliki legitimasi hukum, modal ekonomi yang kuat, maupun kekuatan politik untuk menandingi otoritas perusahaan. Kondisi ini menggambarkan bagaimana ekspansi perkebunan tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga mereproduksi ketimpangan struktural yang semakin menekan kelompok adat di ruang hidup mereka sendiri (Prasetijo, 2017; Vandergeest & Peluso, 2006).

Tabel 1. Kategori Akses dan Perubahan

Kategori Akses	Perubahan/Status Saat Ini	Implikasi Teoretis
Hak (Rights)	Hak adat leluhur secara hukum hilang digantikan oleh HGU perusahaan. Akses kini bersifat izin informal dan bersyarat dari perusahaan (Bapak Herman, 47 tahun).	Akses melalui hak digantikan oleh akses melalui authority (kekuasaan legal perusahaan).
Kapital (Capital)	Hasil hutan/buruan dijual untuk memperoleh uang tunai. Keterbatasan modal membatasi peningkatan kapasitas produksi.	Kapital menjadi prasyarat untuk mempertahankan hidup, menunjukkan pergeseran dari subsisten ke ekonomi pasar.
Teknologi (Technology)	Adopsi senapan angin dan kendaraan bermotor (Mantap, 18 tahun) meningkatkan efisiensi dan jangkauan berburu.	Pemanfaatan physical capital untuk mengatasi keterbatasan natural capital.
Pasar (Market)	Menjual hasil buruan dan mengambil brondolan sawit (Lukas, 24 tahun) sebagai akses ke uang tunai.	Menciptakan illegal access mechanism (mengambil brondolan) sebagai strategi bertahan.
Pengetahuan (Knowledge)	Pengetahuan lokal tentang pohon madu dan jalur buruan (Bapak Senen, 32 tahun) tetap menjadi aset penting untuk bertahan hidup.	Pengetahuan berfungsi sebagai modal ekologis dan kekuatan adaptif di tengah berkurangnya hutan.
Otoritas (Authority)	Kekuasaan Tumenggung terbatas. Otoritas formal kini dipegang oleh perusahaan pemegang HGU dan aparat.	Kekuatan otoritas hukum formal mengalahkan otoritas adat.
Identitas Sosial (Social Identity)	Identitas adat memberikan legitimasi moral, tetapi stigma sosial membatasi akses terhadap peluang ekonomi formal.	Hambatan sosial-kultural membatasi akses, memperkuat marginalisasi.
Hubungan Sosial (Social Relations)	Jaringan dengan pekerja kebun, pengepul, LSM, dan jurnalis menjadi mekanisme akses alternatif terhadap sumber daya dan advokasi.	Modal sosial menjadi jembatan penting untuk mengurangi kerentanan hidup.

Akses Orang Rimba terhadap sumber daya hutan kini mengalami perubahan besar, dari kondisi ketika mereka memiliki kebebasan penuh untuk memanfaatkan hutan secara otonom menjadi situasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan pemegang konsesi. Jika sebelumnya hutan dapat diakses tanpa batas berdasarkan aturan adat dan pengetahuan turun-temurun, kini kemampuan mereka untuk memanfaatkan ruang hidup tersebut lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor nonformal seperti pengetahuan lokal tentang lokasi satwa dan tumbuhan, jaringan sosial dengan pekerja kebun atau pihak luar, serta strategi informal bahkan ilegal yang mereka lakukan untuk bertahan hidup. Dalam kondisi di mana hak hukum tidak lagi berpihak pada mereka, strategi-strategi ini menjadi jalan utama bagi Orang Rimba untuk tetap memperoleh makanan, pendapatan, dan ruang gerak. Pada saat yang sama, perjuangan

mereka bukan hanya soal bertahan secara ekonomi, tetapi juga upaya mempertahankan identitas budaya, hubungan spiritual dengan hutan, dan keberlanjutan komunitas di tengah tekanan sistem ekonomi modern yang semakin menekan ruang hidup mereka.

Strategi Akses Orang Rimba

Strategi Orang Rimba untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya di tengah ekspansi perkebunan kelapa sawit bersifat pragmatis, adaptif, dan *multijalur*. Perubahan lanskap akibat konversi hutan menjadi konsesi sawit menuntut mereka untuk menyesuaikan diri secara fleksibel, baik melalui jalur formal maupun informal. Dalam konteks teori akses [Ribot dan Peluso \(2003\)](#), strategi yang dilakukan ini menunjukkan bagaimana aktor yang memiliki posisi lemah secara struktural tetap dapat mempertahankan akses melalui negosiasi, jaringan sosial, teknologi, hingga identitas budaya. Salah satu strategi utama yang ditempuh adalah melalui jalur formal dengan menjalin hubungan baik dengan pihak perusahaan, terutama program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Melalui mekanisme ini, sebagian anggota komunitas memperoleh akses terbatas terhadap layanan kesehatan, bantuan sosial, serta izin tidak resmi untuk tetap berburu di kawasan hutan sekunder. Seperti disampaikan Bapak Herman (47 tahun), pihak perusahaan masih memberikan toleransi terhadap aktivitas berburu selama tidak merusak tanaman atau mengambil sawit secara langsung. Strategi ini menunjukkan bahwa meskipun berada secara hukum, Orang Rimba tetap memanfaatkan ruang negosiasi yang tersedia untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian [Pandjaitan et al. \(2016\)](#) yang menunjukkan bahwa kelompok rentan sering bergantung pada hubungan patron–klien untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya di ruang yang dikuasai korporasi.

Selain memanfaatkan jalur formal melalui hubungan dengan perusahaan, Orang Rimba juga bergantung pada strategi informal yang pada praktiknya sering dianggap melanggar aturan oleh pihak perkebunan. Salah satu strategi yang paling penting adalah mengumpulkan *brondolan* sawit, yaitu buah sawit yang jatuh ke tanah setelah panen. Aktivitas ini menjadi sumber pendapatan yang sangat berarti bagi mereka karena dapat langsung ditukar dengan uang untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, dan perlengkapan sehari-hari lainnya. Dalam kondisi di mana hasil hutan semakin sulit ditemukan akibat alih fungsi lahan, *brondolan* sawit menjadi salah satu sumber ekonomi yang paling mudah dijangkau oleh komunitas, terutama perempuan dan anak-anak. Meskipun perusahaan secara jelas melarang pengambilan *brondolan* dan menganggapnya sebagai tindakan pencurian, kegiatan ini tetap dilakukan oleh Orang Rimba karena mereka memandang *brondolan* sebagai bagian dari sumber daya alam yang tidak merugikan perusahaan. *Brondolan* yang telah jatuh dari pohonnya dianggap sebagai hasil yang tidak lagi terikat pada pemilik secara langsung, sehingga boleh dikumpulkan untuk kebutuhan hidup. Selain itu, bagi Orang Rimba, wilayah perkebunan sawit merupakan kawasan yang dahulu merupakan ruang hidup leluhur mereka, sehingga mengambil *brondolan* memiliki makna moral sebagai bentuk pemanfaatan sisa-sisa sumber daya yang dahulu secara adat menjadi milik mereka. Hal ini ditegaskan oleh Rambo (37 tahun), yang menyampaikan bahwa *brondolan* merupakan sumber makanan dan pendapatan yang tidak bisa mereka tinggalkan, terutama karena kebutuhan keluarga yang mendesak.

Fakta bahwa aktivitas ini terus berlangsung meskipun ada larangan menunjukkan bahwa pengambilan *brondolan* adalah bagian dari strategi bertahan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari Orang Rimba. Kegiatan ini bukan sekadar usaha ekonomi, tetapi juga bentuk adaptasi terhadap situasi yang berubah, di mana akses mereka terhadap hutan dan sumber daya alam kini semakin terbatas. Dalam konteks ini, pengumpulan *brondolan* menjadi cara praktis dan realistis bagi komunitas untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika pilihan lain tidak tersedia atau sangat terbatas. Dengan demikian, praktik ini menunjukkan bagaimana Orang Rimba terus bernegosiasi dengan struktur kekuasaan yang ada dan berusaha mempertahankan keberlangsungan hidup mereka di tengah tekanan ekspansi perkebunan.

Relasi sosial juga menjadi modal penting dalam strategi akses Orang Rimba. Mereka menjalin hubungan baik dengan pekerja kebun, pengepul hasil buruan, serta pihak-pihak eksternal seperti LSM dan jurnalis. Melalui hubungan ini, mereka memperoleh informasi mengenai lokasi buruan, mendapatkan akses terhadap pasar, hingga mendapat dukungan ketika terjadi ketegangan dengan perusahaan. Ibu Leni Rambo (37 tahun) menuturkan bahwa hubungan baik dengan pekerja kebun memungkinkan mereka memperoleh informasi penting terkait lokasi satwa, sekaligus memanfaatkan fasilitas seperti tempat pengisian daya listrik. Temuan ini sejalan dengan analisis [Peluso \(2023\)](#) yang menekankan pentingnya jaringan sosial sebagai mekanisme akses nonformal dalam ruang yang dikuasai negara maupun korporasi.

Strategi berikutnya adalah pemanfaatan teknologi modern yang semakin banyak diadopsi oleh Orang Rimba. Peralihan dari tombak ke senapan angin, serta penggunaan sepeda motor untuk mobilitas dan transportasi hasil buruan, menunjukkan kemampuan adaptatif mereka dalam memanfaatkan modal teknologi. Senen (32 tahun) menjelaskan bahwa senapan angin memudahkan mereka memperoleh hasil

buruan yang lebih pasti dan bernilai ekonomi tinggi. Adaptasi teknologi ini memperkuat strategi penghidupan mereka, meskipun di saat yang sama memperkuat ketergantungan mereka terhadap pasar. Hal ini selaras dengan kajian Fatmasari et al. (2018) yang menunjukkan bahwa integrasi masyarakat lokal ke dalam sistem ekonomi sawit sering disertai dengan peningkatan ketergantungan pada teknologi dan pasar.

Identitas adat juga berfungsi sebagai strategi penting dalam mempertahankan akses. Meskipun tidak lagi diakui secara formal dalam sistem konsesi perkebunan, identitas sebagai kelompok adat pemilik wilayah leluhur tetap menjadi dasar moral untuk menegaskan hak mereka tinggal dan memanfaatkan ruang tersebut. Panglima menegaskan bahwa hutan merupakan warisan nenek moyang dan bukan milik perusahaan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa identitas budaya berperan sebagai bentuk “klaim simbolik” yang berfungsi mempertahankan legitimasi moral atas ruang hidup mereka, sebagaimana dijelaskan Prasetijo (2018) mengenai relasi Orang Rimba dan konsep wilayah leluhur. Secara keseluruhan, strategi akses Orang Rimba merupakan kombinasi antara adaptasi teknologi, negosiasi formal, pemanfaatan jaringan sosial, dan perlawanan informal. Strategi-strategi ini mencerminkan kemampuan mereka untuk bertahan dalam struktur kekuasaan yang timpang, sekaligus menunjukkan bahwa akses tidak hanya ditentukan oleh hak formal, tetapi juga oleh kemampuan memanfaatkan berbagai mekanisme sosial, ekonomi, dan simbolik yang tersedia.

Analisa Teori Akses

Perspektif Teori Akses

Pembahasan tentang akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam banyak dibangun dari kerangka Ribot & Peluso (2003), yang menekankan bahwa kemampuan seseorang atau kelompok untuk memanfaatkan sumber daya tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan hukum, tetapi oleh berbagai bentuk kekuasaan yang bekerja di lapangan. Dalam kasus Orang Rimba, teori ini sangat membantu menjelaskan bagaimana mereka tetap bisa memanfaatkan sebagian ruang hutan meskipun secara formal wilayah tersebut telah berubah status menjadi konsesi perusahaan. Peluso (2023) menegaskan bahwa penguasaan sumber daya biasanya bergantung pada kombinasi kekuatan negara, perusahaan, dan aktor lokal, bukan sekadar pada legalitas tertulis. Kondisi ini terlihat jelas dalam situasi Orang Rimba yang harus bergantung pada toleransi perusahaan pemegang HGU untuk tetap bisa berburu atau mengumpulkan hasil hutan.

Penelitian antropologis juga menunjukkan bahwa komunitas adat tidak sepenuhnya pasif ketika berhadapan dengan perubahan struktur kekuasaan. Mereka sering merespons melalui negosiasi, penyesuaian, atau bahkan perlawanan halus. Prasetijo (2018) menjelaskan bahwa relasi antara masyarakat adat dan otoritas eksternal selalu terjadi melalui proses saling memengaruhi, bukan satu arah. Konsep “perlawanan sehari-hari” dari Scott (1985) turut menjelaskan bagaimana tindakan kecil seperti mengambil *brondolan* sawit, mencari makan di pinggir konsesi, atau tetap bermukim di wilayah yang mereka anggap sebagai tanah leluhur adalah bentuk penegasan identitas sekaligus cara mempertahankan ruang hidup. Dengan demikian, kajian literatur menunjukkan bahwa hilangnya hak formal tidak otomatis membuat masyarakat adat kehilangan akses. Akses justru terus dinegosiasikan melalui hubungan sosial, simbol budaya, dan strategi adaptif yang mereka bangun dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi Penghidupan dalam Lanskap Sawit

Literatur mengenai strategi penghidupan masyarakat di wilayah yang mengalami ekspansi sawit menegaskan bahwa perubahan ekologis dan ekonomi memaksa komunitas lokal untuk beradaptasi dengan berbagai cara. Fatmasari et al. (2018) menunjukkan bahwa ketika hutan berubah menjadi kebun sawit, masyarakat tidak hanya kehilangan sumber daya alam, tetapi juga harus menata ulang cara mereka memenuhi kebutuhan hidup. Fenomena ini terlihat pada Orang Rimba yang kini mengombinasikan berburu intensif, mengumpulkan *brondolan*, hingga terlibat dalam aktivitas pasar lokal sebagai sumber ekonomi. Penelitian Putri et al. (2018) memperkuat gagasan bahwa strategi penghidupan masyarakat di lanskap sawit tidak hanya berfokus pada satu jenis mata pencaharian. Mereka memanfaatkan modal sosial, hubungan dengan pihak luar, serta teknologi sebagai bagian dari strategi bertahan. Orang Rimba yang beralih menggunakan senapan angin, sepeda motor, dan menjalin hubungan dengan pekerja kebun atau pengepul adalah contoh nyata bagaimana adaptasi tersebut terjadi.

Asyifah & Faristiana (2023) menekankan bahwa perkembangan teknologi membawa perubahan besar bagi mata pencaharian masyarakat rural. Dalam konteks Orang Rimba, teknologi bukan hanya alat bantu berburu, tetapi juga penghubung mereka dengan pasar yang memberi nilai ekonomi pada hasil buruan atau hasil hutan lainnya. Pergeseran ini menunjukkan bahwa strategi penghidupan mereka tidak lagi sepenuhnya terikat pada sistem subsisten tradisional. Dari keseluruhan literatur, terlihat bahwa strategi bertahan hidup masyarakat yang terdampak ekspansi sawit bersifat campuranm enggabungkan cara-cara lama dengan peluang baru yang muncul dari perubahan sosial dan ekologis. Strategi Orang Rimba pun

berjalan dalam pola yang sama: fleksibel, berlapis, dan selalu menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan yang terus berubah.

Kesimpulan

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) telah membawa perubahan besar terhadap sistem kehidupan Orang Rimba, terutama dalam hal akses terhadap hutan sebagai sumber utama penghidupan mereka. Sebelum adanya ekspansi, Orang Rimba memiliki akses bebas terhadap hutan untuk berburu, meramu, dan menjalankan ritual adat. Namun, setelah lahan hutan beralih menjadi kawasan HGU perusahaan, ruang gerak mereka menjadi terbatas dan bergantung pada izin atau toleransi pihak luar seperti perusahaan dan pemerintah.

Perubahan ruang hidup berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Orang Rimba. Pola hidup orang rimba sudah mulai berubah dari yang semula sepenuhnya bergantung pada hutan, kini mulai berinteraksi dengan masyarakat luar, sudah mulai mengenal sistem jual beli, serta sudah menggunakan alat modern seperti senapan angin untuk berburu dan sudah bisa mengendarai kendaraan. Namun, mereka masih menghadapi stigma sebagai “orang terbelakang” dan sulit diterima oleh masyarakat luar. Orang Rimba dalam mempertahankan hidupnya menggunakan berbagai strategi akses. Mereka membangun hubungan baik dengan pekerja kebun dan masyarakat sekitar, menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan, serta memanfaatkan pengetahuan lokal yang dimiliki. Mereka juga menggunakan identitas adat untuk menegaskan hak mereka atas hutan, meski tidak memiliki hak hukum. Strategi ini memperlihatkan bentuk adaptasi dan perlawanan halus terhadap sistem kekuasaan dan ekonomi yang membatasi kehidupan mereka. Upaya Orang Rimba untuk mempertahankan akses mereka terhadap hutan sering menimbulkan konflik, terutama ketika Orang Rimba mengambil *brondolan* sawit atau membuka lahan baru di kawasan perusahaan. Konflik ini menimbulkan dampak sosial seperti pengusiran, ketegangan dengan pihak keamanan, hingga meningkatnya rasa takut di kalangan masyarakat adat. Namun, di sisi lain, konflik juga membuka ruang dialog antara perusahaan, masyarakat, dan lembaga sosial untuk mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak. Selanjutnya peneliti ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukannya untuk penelitian ini, serta terima kasih kepada seluruh informan yang terlibat selama melakukan penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Al Adawiyah, R., Aditiya, R., Rizky, M., Humairah, & Ridlo, S. R. (2021). Resilience of smallholder palm oil farmers in Sidomulyo Village, South Sumatra. *Jurnal UIN Mataram*.
- Asyifah, S., & Faristiana, A. R. (2023). Dampak perkembangan teknologi terhadap mata pencaharian masyarakat. *Jurnal Sosiologi Pertanian dan Agribisnis*, 5(2), 25–35. <https://doi.org/10.55542/juspa.v5i2.645>
- Azzahra, F., Dharmawan, A. H., & Pandjaitan, N. K. (2015). Women and livelihood resilience of household: Analysis of oil palm expansion impact in Jambi. IPB.
- Daulay, A. (2013). Dinamika pemanfaatan hutan oleh Suku Anak dalam Bathin IX di Dusun Senami Kabupaten Batanghari. *Jurnal Bina Praja*, 5(1), 35–42. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.35-42>
- Fatmasari, R., Darma, R., Salman, D., & Musa, Y. (2018). Landscape ecological changes and livelihood dilemma of the rural household around the oil palm plantation. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 8(6), 2702–2708. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.8.6.7257>
- Galudra, G., van Noordwijk, M., Suyanto, S., Sardi, I., Pradhan, U., & Catacutan, D. (2014). Migrants, land markets and carbon emissions in Jambi, Indonesia. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 19(1), 715–731.
- Harmaini, H., Chandra, F., Kusaimah, K., & Susanti, J. (2022). Kehidupan Suku Anak Dalam dengan masyarakat Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. *Adil*, 4(2), 63–76.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi: Sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial. *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hidayah, N., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2016). Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan perubahan sosial ekologi pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3), 249–56.
- Human Rights Watch. (2019). “When we lost the forest, we lost everything”: Oil palm plantations and rights violations in Indonesia. Human Rights Watch.
- Jazali, M. (2023). Perekonomian Suku Anak dalam (Studi pada Desa Lubuk Jering, Kec. Air Hitam). Universitas Jambi.

- Li, T. M. (2015). Social impacts of oil palm in Indonesia: A gendered perspective. *Journal of Peasant Studies*, 42(2), 1–26.
- Lubis, R. E., & Widanarko, S. (2011). *Buku Pintar Kelapa Sawit*. AgroMedia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. UI Press.
- Mulandari. (2024). *Long-term socio-economic projections for Indigenous communities in Indonesian palm oil landscapes*. CIFOR–ICRAF.
- Obie, M. (2019). *Oil palm expansion and livelihood vulnerability on rural communities: A case in Pohuwato Regency – Indonesia*. Academia.
- Pandjaitan, N. K., Fatimah, A., & Ary, H. D. (2016). Resiliensi nafkah rumah tangga petani sawit: Dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(2), 25–35.
- Peluso, N. L. (2023). *Rich forests, poor people: Resource control and resistance in Java*. University of California Press.
- Prasetijo, A. (2017). *Livelihood transformations of the Orang Rimba as tacit resistance in the context of deforestation*. E-Journal Undip.
- Prasetijo, A. (2018). Living without the forest: Adaptive strategy of Orang Rimba. *Senri Ethnological Studies*; Academia; Jurnal IPB.
- Prasetijo, A. (2018). Memahami hubungan Orang Rimbo dan Waris-Jenang dalam konteks teori praktik. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/endogami.2.1.1-10>
- Putri, E. I. K., Dharmawan, A. H., Amalia, R., & Pandjaitan, N. K. (2016). Social economic and ecological adaptive strategy of livelihood of smallholders in the oil palm expansion areas. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, IPB.
- Putri, E. I. K., Dharmawan, A. H., Amalia, R., & Pandjaitan, N. K. (2018). Strategi adaptasi sosial ekonomi dan ekologi rumah tangga petani di daerah ekspansi perkebunan kelapa sawit. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 105–111.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Rizky, A., & Wulandari, P. (2023). Literature review analisis data kualitatif: Tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Sarnoto, A. Z., & Yusuf, M. (2018). [Judul tidak dicantumkan]. [Jurnal tidak disebutkan], 7(1), 1–11.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Setyabudi, M. N. P. (2021). Agama dan kepercayaan minoritas Suku Anak Dalam (SAD) Jambi. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47(2), 147–166.
- Sudrajat, J., Suyatno, A., & Oktoriana, S. (2021). Land-use changes and food insecurity around oil palm plantations: Evidence at the village level. *Forest and Society*, 5(2), 352–364.
- Syahza, A. (2011). Percepatan ekonomi pedesaan melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 297. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i2.200>
- Vandergeest, P., & Peluso, N. L. (2006). Empires of forestry: Professional forestry and state power in Southeast Asia. *Environment and History*, 12(4), 359–393. <https://doi.org/10.3197/096734006779093640>
- Wati, E., Dharmawan, A. H., Damanhuri, D. S., & Sumarti, T. (2017). “From rubber to oil palm”: Livelihood structural transformation of local and transmigrant farmer households in Minangkabau. IPB.
- Wulan Pujiriyani, D., & Puri, W. H. (2013). Suku Anak Dalam Batin 9 dan konflik seribu hektar lahan sawit Asiatic Persada 1. *Bhumi*, 37(12), 122–141.
- Yunita, Y. (2020). Dampak Pembangunan Terhadap Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Dan Sekitar Kecamatan Pulomerak. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 2(1).